

**KEDUDUKAN PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI



OLEH:

PROBOJATI BAYU HERLAMBAANG

NBI : 1312000218

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**KEDUDUKAN PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI



OLEH:

PROBOJATI BAYU HERLAMBAANG

NBI : 1312000218

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
KEDUDUKAN PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN
SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:
PROBOJATI BAYU HERLAMBAK
NBI : 1312000218

Dosen Pembimbing:


Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310130611

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
KEDUDUKAN PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN**

Oleh:
PROBOJATI BAYU HERLAMBAANG
NBI : 1312000218

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 8 Desember 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:/SK/FH/...../.....
Tanggal :

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.
NPP : 20310130611

Sekretaris : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.
NPP : 20310930349

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NPP : 20310160711

Mengetahui :
Dekan,
Universitas 17 Agustus 1945

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 2031086006

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Probojati Bayu Herlambang

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul Skripsi saya, yakni:

"KEDUDUKAN PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN"

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 01 November 2023
Yang membuat pernyataan,



Probojati Bayu Herlambang



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Probojati Bayu Herlambang
NBI : 1312000218
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**KEDUDUKAN PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM
PERUNDANG-UNDANGAN**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

Yang Menyatakan,



(Probojati Bayu Herlambang)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Segala puji dan syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta pertolongan-Nya. Sehingga skripsi yang berjudul “Kedudukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Perundang-Undangan” ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, serta sahabatnya yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan pertolongan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Teristimewa kedua orang tua tercintaku, ayahanda tercinta Bambang Bintarto, S.E., M.M. dan ibunda tercinta Nurul Umi Hidayati, S.E. yang darahnya mengalir dalam tubuh saya yang telah dengan sabar membesarkan putra bungsunya demi studi penulis. Skripsi ini saya persembahkan untuk beliau atas segala doa, dukungan, dan cinta kasih yang selalu diberikan. Tanpa diduga dan diragukan lagi. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya.
3. Kakak tercinta saya Ghanisworo Ayu Pratiwi, S.H., M.Kn. atas doa dan dukungannya kepada penulis dalam memberikan arahan dan masukan kepada adik tercintanya.
4. Terakhir dan tidak kalah penting, saya ingin berterimakasih kepada diri saya sendiri karena tidak memutuskan untuk berhenti dan sudah berjuang sampai dititik ini. Terima kasih telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan memutuskan untuk tetap semangat dan bertahan melewati semua ujian ini sampai selesai dengan banyaknya tantangan. Terima kasih telah bertahan U do ur best!

Penulis memohon maaf apabila didapati kekurangan didalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan juga saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk karya yang lebih baik kedepannya. Harapannya, skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan dan arahan baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CA., CPA. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta jajarannya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku ketua Prodi Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripisi yang telah memberikan arahan serta masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada bapak atas waktunya untuk memberikan saran, nasehat dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H. yang telah memberikan banyak arahan kepada penulis mengenai cara untuk menyusun karya ilmiah.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya dan membuat kelas yang begitu besar terasa lebih kecil karena kehangatannya bapak/ibu. Terima kasih untuk semester-semester yang menyenangkan. Tak satu pun dari kami akan melakukannya dengan baik tanpa dukungan bapak/ibu dosen.
7. Staf administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan masukan dan dukungan dan membantu segala hal yang berbentuk administrasi saya selama pengerjaan skripsi ini.
8. Kepada teman seperjuangan dengan hati emas dan sulit ditemukan Baharuddin Riqiey, Rio Aldino Y.S, Pandu Satriawan Z, Naura Darrin Hasan, Aprilia Kartika Putri yang tiada kata nanti, tunggu dan lelah untuk

bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini, dan selalu memberikan semangat dukungan untuk sama-sama dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita.

9. Terimakasih kepada teman-teman Progran Studi Ilmu Hukum angkatan 20 yang banyak memberikan saran dan motivasi, terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan kebersamaan yang telah digapai selama 3,5 tahun ini semoga menjadi kenangan terindah yang tidak terlupakan
10. Kepada Bapak dan Ibu kos yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi.
11. Kepada teman-teman kos Bapak Pratama Sandi Alala, S.Pd., M.T., Bapak Radit, Bayhaqi, Dani yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam momen-momen sulit selama penulisan skripsi.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum (*legal research*) dengan tipe penelitian hukum normatif yang mana pendekatan yang di pakai adalah pendekatan peraturan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setara dengan peraturan daerah. Hal itu dikarenakan: (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berkedudukan setingkat menteri hanya dalam aspek prosedural pengangkatannya saja, sementara dalam hal membentuk peraturan dirinya berkedudukan sebagai kepala daerah. (2) Dalam segi kewenangan membuat aturan, Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai satuan daerah khusus setingkat provinsi mempunyai kewenangan atribusi dalam hal mengatur (*regelendad*) proses penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara (3) Melihat bahwa kedudukan Kepala Otorita merupakan kepala pemerintahan daerah khusus, maka produk hukum yang dikeluarkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berkedudukan selevel dengan “Peraturan Daerah” yang mana jika disandarkan pada konsep pengelompokan dalam hierarki peraturan perundang-undangan maka letak peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tergolong dalam peraturan daerah. Mengingat kedudukan peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah setingkat peraturan daerah maka hal tersebut berakibat pada segi: (1) pembentukan peraturan, (2) materi muatan, (3) pengawasan pemerintah pusat, (4) pengujiannya.

Kata Kunci: Kedudukan, Peraturan Kepala Otorita, Perundang-Undangan

ABSTRACT

This study aims to determine and understand the position of the regulation of the Head of the Nusantara Capital Authority in the legislative system. The research method used is a legal research method with the type of normative legal research in which the approach used is a statute approach and conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the position of the regulation of the Head of the Nusantara Capital Authority is equivalent to regional regulations. This is because: (1) The Head of the Nusantara Capital City Authority has a ministerial level position only in the procedural aspect of his appointment, while in terms of forming regulations he has the position of regional head. (2) In terms of the authority to make regulations, the Authorities of the Capital City of the Archipelago as a special regional unit at the provincial level has the authority of attribution in terms of regulating (regelendad) the process of implementing the special regional government of the Capital City of the Archipelago (3) Seeing that the position of the Head of the Authority is the head of a special regional government, the legal products issued by the Head of the Authorities of the Capital City of the Archipelago are at the same level as "Regional Regulations" which, if based on the concept of grouping in the hierarchy of laws and regulations, the regulations of the Head of the Authorities of the Capital City of the Archipelago are classified as regional regulations. Considering that the position of the regulation of the Head of the Nusantara Capital Authority is at the level of regional regulations, this has consequences in terms of: (1) formation of regulations, (2) content material, (3) central government supervision, (4) testing.

Keywords: Position, Head of Authority Regulation, Legislation

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Metode Penelitian	4
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Negara Kesatuan.....	9
2.2 Konsep Otonomi Daerah	12
2.3 Konsep Asimetric Desentralisation	14
2.4 Konsep Hirarki Peraturan Perundang-Undangan (Stufenbau Theory)	21
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Kedudukan peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam hierarki peraturan perundang- undangan	25
3.1.1 Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara	25
3.1.2 Kewenangan Membentuk Aturan	31
3.1.3 Kedudukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara	36
3.2 Akibat dari kedudukan peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem perundang-undangan	43
3.2.1 Prosedur Pembentukan.....	43

3.2.2 Materi Muatan.....	47
3.2.3 Pengawasan Oleh Pemerintah Pusat.....	49
3.2.4 Pengujian.....	55
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran.....	60
DAFTAR BACAAN	61

